

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Tegasnya mereka yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata aturan dalam pergaulan masyarakat dapat pula dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan hukum tidak ada habisnya adalah Peredaran Narkotika. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat Kepangkatan Brigadir sampai dengan inspektur.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Peredaran Narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1. Kegunaan Teoritis	4
1.4.2. Kegunaan Praktis	5
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Metodologi Penelitian	6
1.6.1. Jenis Penelitian	7
1.6.2. Metode Pendekatan	8
1.6.3. Jenis Data Penelitian.....	8
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	9
1.6.5. Pengolahan Data.....	10
1.6.6. Metode Analisa Data	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SECARA UMUM DAN PENGEMUDI, SERTA MENGENAI KONSEPSI PERATURAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM).....	12
--	-----------

2.1. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Secara Umum....	12
---	----

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi	16
2.3. Pengaturan Tentang Surat Izin Mengemudi	20
BAB III : PENGATURAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI INDONESIA SERTA PENGATURAN SURAT IZIN MENGEMUDI YANG IDEAL.....	31
3.1. Pengaturan Surat Ijin Mengemudi (SIM) saat ini di Indonesia.....	31
3.2. Pengaturan SIM Yang Ideal Di Indoensia Terhadap Wacana SIM Seumur Hidup.....	51
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72